

BANDARA PERLU TINGKATKAN KAPASITAS TES WHO Siapkan Panduan Bepergian Aman

JENEWA (KR) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) segera menyiapkan panduan untuk maskapai penerbangan berkaitan dengan pencegahan virus Korona di bandara. Hal tersebut dilakukan agar wisatawan tetap bisa aman berada di tempat publik.

"Beberapa hari lagi, kami akan mengeluarkan pertimbangan lebih detail terkait keamanan di bandara untuk para traveler internasional. Kami telah bekerjasama dengan organisasi penerbangan sipil internasional dan asosiasi travel tentang bagaimana risiko penularan bisa dicegah di situasi seperti ini," kata Direktur Eksekutif WHO, Dr Michael Ryan dalam konferensi pers yang diikuti KR, Senin sore (15/6) waktu Jenewa.

Ia menjelaskan, sejauh ini, WHO telah mengeluarkan rincian saran untuk kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang atau yang bersifat keolahragaan, baik itu berkumpul secara spontan maupun yang sudah direncanakan. "Sekali lagi, mari kita ingat-ingat, tidak ada yang namanya nol risiko di lingkungan apapun. Maka, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi risiko tersebut," paparnya.

Ryan menambahkan, untuk mengadakan kembali penerbangan, pihak bandara harus mengurangi risiko penularan hingga ke batas paling minimum dan memitigasi dampak negatif. "Susah untuk menciptakan metode jaga jarak fisik di lingkungan bandara, tapi itu tetap harus dilakukan," terangnya.

"Saya kira, Anda akan melihat maskapai penerbangan dan bandara bekerjasama untuk menye-

diadakan panduan ekstra bersih, termasuk prosedur lepas landas dan lainnya, juga penggunaan masker yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan virus Korona," ucap Ryan.

Epidemiolog asal Irlandia itu menambahkan, bandara serta maskapai juga perlu memiliki data yang lengkap. Sehingga, ketika ada sesuatu yang salah dan infeksi menular, jejak penularan bisa dilacak. "Ini mungkin bukan sesuatu yang dianggap serius, tapi kita harus menciptakan pengalaman travel seaman mungkin. Kita harus paham, bepergian itu tidak mungkin 100 persen aman. Maka, butuh sejumlah kapasitas untuk melacak orang setelah mereka terjangkau virus Korona. Sehingga kita bisa segera memutus rantai transmisi," katanya. (R-1)-d



KR-Surya Adi Lesmana

PEMUGARAN CANDI KALASAN: Candi Kalasan di Dusun Kalibening, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, masih dalam proses pemugaran, Selasa (16/6). Pemugaran tersebut sebagai upaya melestarikan bangunan yang masuk kriteria cagar budaya, dengan salah satu tahapannya pembongkaran struktur atap candi.

PANDEMI COVID-19

BP Jamsostek Lakukan Penyesuaian

MAGELANG (KR) - Di tengah pandemi Covid-19, Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek), dituntut harus melakukan sejumlah penyesuaian, terutama aspek pelayanan dan operasional karena berkaitan dengan isu kesehatan dan keselamatan pekerja, serta karyawan BP Jamsostek sendiri. Misalnya bagaimana mengatur pelayanan terhadap para peserta tanpa melakukan kontak fisik.

Penyesuaian juga berkaitan dengan isu peningkatan jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga sangat memungkinkan akan terjadi lonjakan klaim yang besar di BP Jamsostek, karenanya perlu diantisipasi. "Kami datang ke sini juga untuk memastikan BP Jamsostek siap untuk memberikan pelayanan kepada seluruh peserta," ujar Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto di sela kunjungan ke Kantor BP Jamsostek Cabang Magelang, Selasa (16/6) sore. Pada kesempatan itu juga ditunjukkan kegiatan layanan offline tanpa kontak fisik.

Agus Susanto mengatakan, saat ini yang disiapkan menghadapi banyaknya klaim, serta untuk penerapan protokol kesehatan, diperkenalkan pelayanan dengan tiga kanal, yakni layanan online, offline dan layanan kolektif. Pada layanan online peserta dilayani melalui media online secara total, tanpa ada pertemuan fisik. Ini disebut Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik).

Peserta mendaftar melalui antrean online, mengupload data ke antrean online juga, petugas akan melakukan validasi atau verifikasi secara online dengan video conference. "Setelah selesai, langsung dibayar," katanya. (Tha)-f

SEHARI RATA-RATA 500 PENGUNJUNG

Infrastruktur Normal Baru Malioboro Dipercepat

YOGYA (KR) - Di samping melakukan simulasi pemberlakuan protokol baru di kawasan Malioboro, pihak pengelola juga mulai menyiapkan sarana pendukung. Infrastruktur untuk menghadapi tatanan kehidupan kenormalan baru *new normal* pun dipercepat agar dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Salah satu sarana pendukung tersebut adalah tanda khusus bagi pengunjung di jalur semi pedestrian maupun area pedagang.

"Beberapa tanda itu sudah berhasil kami pasang di pintu masuk kawasan semi pedestrian sisi Utara dan Selatan. Target kami seminggu ke depan bisa terpasang di seluruh tempat yang kerap menjadi pusat keramaian," ungkap Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Malioboro Ekwanto, Selasa (16/6).

Tanda khusus itu berupa stiker warna kuning bergambar telapak kaki. Jarak antartanda sekitar 1 meter. Pengunjung di Malioboro yang menikmati area semi pedestrian akan diarahkan menempati tanda tersebut supaya menghindari kerumunan. Begitu juga terhadap antrean di setiap pedagang kakilima (PKL). "Kami pilih war-

na kuning karena pada malam hari menyala terang. Kebanyakan pengunjung di Malioboro memang pada sore dan malam hari," imbuh Ekwanto.

Selain tanda bergambar telapak kaki, sarana pendukung lainnya ialah tempat cuci tangan, tanda larangan duduk yang ditempel di bangku serta papan 'QR Code'. Secara bertahap seluruhnya akan dipasang di sepanjang Malioboro. Hanya, sarana paling banyak akan ditempatkan di Titik Nol Kilometer karena menjadi pusat keramaian masyarakat.

Ekwanto mengatakan, sejak simulasi dilakukan pada Kamis (11/6) lalu selama enam hari, tercatat ada 3.000 pengunjung yang terekam dalam 'QR Code'. Dengan begitu rata-rata pengunjung tiap hari mencapai 500 orang. Khususnya yang memasuki area pedestrian karena pengendara kendaraan bermotor belum bisa menjajah 'QR Code'.

"Selama simulasi itu ada beberapa pengunjung yang terpaksa kami halau karena tidak menggunakan masker. Tapi jumlah pelanggaran tidak bisa kami rekap jumlahnya, yang jelas sekarang sudah jauh berkurang," katanya. (Dhi)-f

TAP MPRS NO 25/1966 MASIH BERLAKU

Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

JAKARTA (KR) - Merespons banyaknya kritik dan keberatan dari banyak kalangan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan DPR.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah dan sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP.

"Pemerintah meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat," kata Mahfud saat bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (16/6).

Pemerintah, lanjut Mahfud, tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk pembahasan itu. Sementara aspek substansinya, jelas Mahfud, Presiden Joko Widodo menyatakan juga, Tap MPRS No 25 Tahun 1966 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

"Oleh sebab itu, pemerintah tetap berkomitmen, Tap MPRS No 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme itu merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini," kata Mahfud dalam video yang disebar Humas Kemenko Polhukam itu.

Mengenai rumusan Pancasila, katanya, pemerintah berpendapat, rumusan Pancasila yang sah itu adalah yang disahkan pada 18

Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Menkumham Yasonna Laoly menambahkan, pihaknya tadi membahas dan memperhatikan pandangan-pandangan dari banyak elemen masyarakat terkait RUU HIP. Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP, kata Yasonna, untuk memberikan kesempatan kepada DPR kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Mengena prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan akan ditindaklanjuti dengan DPR dan diharapkan masyarakat bisa betul-betul melihat substansinya dengan baik.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Balleg) DPR Achmad Baidowi merespons pernyataan Menkopolkum Mahfud MD, bahwa pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Ia mengatakan nantinya tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait

RUU tersebut.

"Jika pemerintah menolak pembahasan, berarti RUU HIP dikembalikan ke DPR dan tidak ada pembahasan lebih lanjut," ujar Baidowi.

Ia mengatakan, jika disusun kembali, DPR punya kesempatan luas untuk menampung aspirasi terkait RUU HIP. Mekanismenya sudah diatur dalam UU 15/2019 jo UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan DPR tentang Pembentukan UU dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib).

Terkait penundaan pembahasan RUU HIP, DPR meminta pemerintah mengirimkan sikapnya secara tertulis baik itu menunda, menolak atau menyetujui pembahasan.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan fraksinya mengapresiasi dan menyambut baik sikap pemerintah yang memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. (Ant/Obi)-f

KONDISI DI JATENG BERBEDA-BEDA

Ganjar: 'Aja Kesusu' Normal Baru

TEMANGGUNG (KR) - Provinsi Jawa Tengah tidak akan terburu-buru menerapkan status normal baru, karena kondisi masing-masing kabupaten/kota di Jateng dalam kasus Covid-19 berbeda-beda.

"Jawa Tengah secara keseluruhan belum akan menerapkan normal baru, *aja kesusu*, ada daerah yang masuk zona merah, ada yang kuning, dan ada yang hijau," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai meninjau sejumlah pasar tradisional di Temanggung, Selasa (16/6).

Ganjar menyatakan, masing-masing kabupaten/kota diminta tidak terburu-buru menerapkan normal baru. Perlu menunggu perkembangan setidaknya dalam dua kali 14 hari, apakah kasus sudah melandai dan melantai, kemudian tidak ada kasus baru Covid-19.

Berdasarkan versi kemarin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada tiga daerah zona merah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Mage-

lang, yang lainnya kuning. Kemudian yang masuk zona hijau Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Wonosobo. "Apakah keadaan itu betul? Maka perlu kita cek. Kemudian saya masukkan Kabupaten Temanggung karena bupati rajin tiap hari ngabari saya perkembangannya. Dari situ lah untuk Jateng keseluruhan belum, maka jangan tergesa-gesa untuk bicara normal baru," pesannya.

Menurut Ganjar, lebih baik latihan sektor dan subsektor dulu, jangan tergesa-gesa bicara normal baru. Jika memang menerapkan normal baru maka harus berani bertanggung jawab termasuk menarik kembali status normal baru jika ada kasus-kasus baru. "Kembali status maka akan berdampak lebih besar dibanding saat pertama terjadi," katanya.

Ganjar mengatakan, boleh saja menggelar resepsi pernikahan, tetapi harus terbatas misalnya diikuti 10 orang saja, yang penting dinikahkan, diijabkan selesai. Pesta pernikahan ditunda dahulu. Demikian juga untuk

kegiatan lain seperti di pondok pesantren dan pendidikan harus hati-hati.

Ganjar mengatakan, Jateng secara keseluruhan belum ada normal baru, tetapi ada beberapa kabupaten bisa uji coba, seperti di Kabupaten Banyumas dan Wonosobo. "Silakan yang terpenting perhatikan dan tetap berpedoman protokol kesehatan," tegasnya.

Ganjar berharap pasar tradisional tidak menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19, karena itu perlu penataan pasar yang lebih bagus. "Kesadaran masyarakat sudah bagus, tinggal kita mengajari masyarakat disiplin," katanya.

Merespons pernyataan Gubernur Jateng soal Kabupaten Magelang termasuk salah satu zona merah, Bupati Magelang Zaenal Arifin akan segera menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jateng. "Kami segera mengeluarkan Instruksi Bupati selaku Ketua Gugus Tugas untuk mengurangi jumlah orang yang terpapar Covid-19. Ini juga sebagai persiapan menuju kenormalan baru," kata Zaenal. (Osy/Bag)-d

40.400 POSITIF COVID-19

15.703 Orang Sembuh

JAKARTA (KR) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per Selasa (16/6) totalnya menjadi 40.400 orang, setelah ada penambahan kasus baru 1.106 orang. Untuk pasien sembuh menjadi 15.703 orang, setelah ada penambahan 580 orang. Sedangkan kasus meninggal menjadi 2.231 dengan penambahan 33 orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yuriyanto di Media Center Gugus Tugas Nasional Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (16/6) menyebutkan, akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan 8.776 spesimen pada hari sebelumnya, dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 523.063. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 110 laboratorium, Test Cepat Molekuler (TCM) di 82 lab dan lab jejaring (RT-PCR dan TCM) di 222 lab.

Untuk jumlah orang yang diperiksa ada 17.052 dengan akumulasi 540.115. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif 1.106, negatif 9.013, sehingga secara akumulasi menjadi positif 40.400 dan negatif 298.909.

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro menyatakan, sebagian masyarakat ingin memahami seluk beluk virus SARS-CoV-2 penyebab Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu pertanyaan yang masuk melalui laman covid19.go.id dan kanal media sosial yakni keberadaan Covid-19. (Ati)-f

SEGERA DIUMUMKAN PANDUAN PESANTREN

Utamakan Kesehatan Para Santri

JAKARTA (KR) - Kebijakan pembukaan pesantren untuk kegiatan tatap muka akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Selasa (16/6).

Mengapresiasi dan mendukung kebijakan tersebut dan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di Indonesia. Menurut Kamaruddin, Kemenag menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena mengelola pendidikan dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. "Kami sepenuhnya mendukung dan setuju apa yang telah dipaparkan Mendikbud. Khususnya terkait pendidikan madrasah," jelas Kamaruddin.

Karakter pendidikan madrasah dan sekolah sama. Kebijakan pendidikan madrasah sama dengan kebijakan sekolah. Panduan Ini juga hasil rumusan dan diskusi panjang yang dilakukan intensif dan bersama. "Kami sangat mendukung kebijakan itu," sambungnya.

Namun, selain madrasah, Kemenag juga mengelola pendidikan pesantren serta pendidikan agama dan keagamaan. Kebijakan terkait ini akan disampaikan secara khusus oleh Menag. Secara garis besarnya sama, Kemenag mengedepankan upaya menjaga kesehatan dan keutamaan para santri dan siswa lembaga pendidikan agama serta keagamaan lainnya.

Kamaruddin menambahkan, pesantren saat ini ada yang telah memulangkan santrinya dan ada juga yang tidak memulangkan santrinya. Mereka tetap melakukan pembelajaran dengan protokol kesehatan. (Ati)-f



KR-Effy Widjono Putro

MASIH DISUKAI: Seorang bocah bermain layang-layang di pematang sawah Dusun Candran, Sidoarum, Godean, Sleman (16/6) sore. Meski telah banyak sarana bermain dari perangkat teknologi modern, layang-layang yang memainkannya terganggu musim, masih disukai masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa.